

ABSTRAK

Masalah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Blora selalu terulang setiap tahun di musim kemarau. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan ada 3 (tiga), yaitu hukum administrasi, hukum perdata, terakhir hukum pidana. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Blora, serta faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Blora dan solusinya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi lapangan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Sebagai pisau analisis digunakan teori penegakan hukum, teori keadilan, dan teori kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Blora tidak berjalan optimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya upaya penyidikan yang dilakukan oleh PPNS maupun Polri dalam tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, sehingga belum pernah ada kasus pembakaran hutan yang diselesaikan melalui jalur penal. Upaya penegakan hukum lebih diutamakan melalui upaya preventif. Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Blora adalah faktor undang-undang dimana terdapat disharmonisasi undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, kesulitan mencari pelaku dan saksi, keterbatasan biaya dalam penyidikan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dan kurangnya kesadaran masyarakat. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menjadikan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum pembakaran hutan dan lahan, tidak melanjutkan kasus kebakaran hutan ke tahap penyidikan, dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pencegahan pembakaran hutan dan lahan.

Kata kunci : penegakan hukum pidana, pembakaran hutan dan lahan

ABSTRACT

The problem of forest and land fires in Blora Regency is repeated every year in the dry season. There are three law enforcement efforts for acts of forest and land fire, namely administrative law, civil law, and finally criminal law. The problem discussed in this study is how is the enforcement of criminal law against the perpetrators of forest and land burning in Blora Regency, as well as the inhibiting factors of criminal law enforcement against perpetrators of forest and land burning in Blora Regency and its solutions.

The approach method used is normative juridical, descriptive analytical research specifications. The data used is secondary data. Data collection method is a field study. The data analysis method uses qualitative analysis. As a knife for analysis, law enforcement theory, justice theory and legal certainty theory are used.

The results showed that the enforcement of criminal law against perpetrators of forest and land fires in Blora is not running optimally. This is evidenced by the absence of investigative efforts carried out by PPNS and the National Police in the crime of burning forests and land, so that there has never been a case of forest fires that was resolved through the criminal route. Law enforcement efforts are preferred through preventive measures. The inhibiting factors of criminal law enforcement against the perpetrators of forest and land burning in Blora Regency are the factors of laws where there is disharmony of laws governing the criminal acts of forest and land burning, difficulty in finding perpetrators and witnesses, limited costs in investigating criminal acts of forest burning and land and lack of public awareness. The solution to overcome these obstacles is to make criminal law the last resort in enforcing forest and land burning laws, not continuing the case of forest fires to the investigation stage, and conducting socialization to the public about preventing forest and land burning.

Keywords: ***criminal law enforcement, forest and land burning***